



# RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

REV  
01



# HALAMAN FRANCIS

## JUDUL

# Rencana Strategis 2022 - 2024

Penulis : Yuli Rianawati, S.T.  
Retno Nurhayati Pratiwi, M.Pd.

Pengarah : Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.  
Romy Satria Lesmana, MT.  
Taufik Hidayat, S.E.

Kontributor Data : Trimukti Zahrowani, S.E., M.Tr.A.P.  
Nur Fitriani, SE., M.Ak.  
Aam Sudrajat, S.Si., M.Ed.  
Dr. Dhyah Muthmainah, SE., M.M.  
Dearn Dewy Hasianny, SE., M.M.  
Poppy Herawati, S.Kom., M.A.B.

Editor : Tim Reviuwer BBGP Prov. Jabar

Ilustrasi Sampul : Yuli Rianawati, S.T.

Disain & ilustrasi Buku : Yuli Rianawati, S.T.



Diterbitkan oleh Balai Besar guru Penggerak  
Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2021

Balai Besar guru Penggerak Provinsi Jawa Barat,  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi  
buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin  
tertulis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi.

# Tim Reviuwer BBGP Prov. Jawa Barat Rencana Strategis 2022 - 2024

1. Dr. Beny Iskandar, M.Pd.
2. Dr. Ratnawati Muniningrum, M.Pd.
3. Dr. Hermansyah, M.Pd.
4. Dr. H. Tatang Sunendar Iskandar, M.Si.
5. Drs. Asep Suhendi Arifin, M.M.Pd.
6. Dr. Dadang Garnida, M.Pd.
7. Dr. Yeni Hendriani
8. Dr. Achyar, M.Pd.
9. Dra. Dewi Agustini, M.M.
10. Dr. Komar Hidayat, M.Pd.
11. Drs. Rahmat Hidayat, M.Pd.
12. Drs. Rudy Budiman, M.Pd.
13. Dr. Asep Zuhara Argawinata, M.I.Kom.
14. Dr. H. Agus Djaja Dihadja, M.Pd.
15. Dr. Agus Mulyadi, M.Pd.
16. Drs. Asep Suhendi Arifin, M.M.Pd.
17. Dr. Muhamad Yani, M.Sc.Ed.
18. Dr. Liza Hanurani, M.Pd.
19. Sadiyah Kusumahwati, S.Pd., M.Ed.
20. Drs. Yaya Kurnia, M.Pd.
21. Aline Puspasari, S.E., M.Ed.
22. Yoki Ariyana, S.T., M.T.
23. Aam Sudrajat, S.Si., M.Ed.
24. Drs. Suardi, M.Pd.
25. Dr. Sumarna, M.Pd.
26. Iden Rusdi, S.T., M.Ed.
27. Nur Hidayati, S.Kom., M.T.
28. Dr. Agus Irawan Sensus, M.Pd.
29. Suswanto Heru Purnomo, S.Psi., M.Ed.
30. Rina Agustin Susanti, S.Sos., M.Pd.
31. Temmy Syamsu Taufiq, S.Sos., M.Ed.
32. Endang Saeful Munir, S.Pd., M.Si.
33. Edy Prabowo Atanasius, S.Si., M.T.
34. Moch. Erwin Maulana, S.Si., M.Si.
35. Drs. Mamat Supriatna, M.Pd.
36. Suharto, S.Pd., M.T.
37. Soni Sukendar, S.Pd., M.Si., M.T.
38. Aritta Megadomani, S.Si., M.Pd.
39. Ir. Tisna Suwanda
40. Lia Zalilia, S.Kom., M.T.



# KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang terbentuknya Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di 33 Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menjadi landasan yuridis bagi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat (BBGP Provinsi Jawa Barat) yang merupakan penggabungan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK), dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa (PPPPTK TK dan PLB). Mengemban amanat dimaksud, sebagai lembaga baru tentu segera menyiapkan perencanaan yang matang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) BBGP Provinsi Jawa Barat tahun 2022 – 2024 merupakan perwujudan pemikiran dan komitmen Lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BBGP Provinsi Jawa Barat berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dimaksud disusun untuk memenuhi dan menjawab tuntutan peningkatan kinerja aparatur maupun lembaga yang harus diemban oleh BBGP Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan manajemen guna mencapai tujuan dan sasaran Lembaga sebagaimana diamanatkan oleh Renstra pada periode sebelumnya.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kekuatan untuk merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dan bisa memberikan kontribusi peningkatan mutu pendidikan di tanah air.

Bandung, 19 Januari 2023

Kepala,

Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.

NIP 196701101994031003



# DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	I
2. DAFTAR ISI	II
3. Surat Keputusan Kepala BBGP Prov. Jabar tentang Rencana Strategis BBGP Prov. Jabar Tahun 2022-2024	III
4. BAB I PENDAHULUAN	1
5. 1.1 Kondisi Umum	2
6. 1.2 Gambaran Pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya	3
7. 1.3 Isu-isu Strategis Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	7
8. 1.4 Potensi dan Permasalahan	12
9. BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LEMBAGA	25
10. 2.1 Tujuan, Strategi dan Indikator Kinerja Tujuan Strategi	26
11. 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	27
12. BAB III STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
13. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	30
14. 3.2 Kerangka Regulasi	37
15. 3.3 Kerangka Kelembagaan	38
16. 3.4 Reformasi Birokrasi	40
17. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
18. 4.1 Target Kinerja	42
19. 4.2 Kerangka Pendanaan	43
20. BAB V SEAQIS DAN SEAQIL	44
21. 5.1 SEAMEO QITEP in Science	45
22. 5.2 SEAMEO QITEP in Language	47
23. 5.3 Target dan Sasaran 2023	49
24. BAB VI PENUTUP	50
25. Lampiran	51



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK  
PROVINSI JAWA BARAT**  
Jl. Diponegoro Nomor 12, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115  
Telp. (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922,  
Surel: bbgppjabar@kemdikbud.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU PENGGERAK  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 0666/B7.2/OT.01.00/2023**

Tentang

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR GURU PENGGERAK  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang.
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian rencana strategis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022-2024;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan anggaran pada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, perlu penyesuaian perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Strategis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2024;

Mengingat.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) dan BGP (Balai Guru Penggerak).

## MENETAPKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022- 2024**

### Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen perencanaan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2022-2024.
- (2) Renstra Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat ini.

### Pasal 2

Rencana Strategis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi,

- a. Bab I : Pendahuluan,
- b. Bab II : Tujuan dan Sasaran Strategis,
- c. Bab III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan,

- d. Bab IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendaan
- e. Bab V : Penutup
- f. Lampiran

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Rencana Strategis Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020 - 2024.

### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Renstra yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022-2024.

### Pasal 4

Rencana Strategi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### Pasal 5

Seluruh unit kerja di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat yang telah dituangkan dalam rencana kerja Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat.

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan menetapkan sebagaimana peraturan berlaku.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Januari 2023  
Kepala Balai Besar Guru Penggerak  
Provinsi Jawa Barat



  
Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.  
NIP 196701101994031003

**SALINAN  
LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU  
PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 0666/B7.2/OT.01.00/2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR  
GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022-2024**

# BAB 1 PENDAHULUAN

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa.

Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 adalah “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Selain itu juga pada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat

yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”, dan dua dari Visi Misi Presiden kembali menegaskan bahwa Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Demikian halnya yang tercantum dalam sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, dengan salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Penyusunan Renstra BBGP Provinsi Jabar dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), secara teknokratik dan partisipatif, dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pendidikan,



**Gambar 1.1**  
Trauma Healing Pasca Bencana  
Gempa Bumi Cianjur

Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2020 - 2024. Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, maka BBGP Prov. Jabar harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.



**Gambar 1.2**  
Konsolidasi Internal bersama  
Widyaiswara dan PTP

**Gambar 1.3**

*Konsolidasi Internal bersama Widyaiswara dan PTP 2023*



Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen Renstra ini merupakan penyempurnaan rencana strategis dari 3 (tiga) PPPPTK yang melebur menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, mempercepat akselerasi transformasi pendidikan, mensinergikan program prioritas kementerian dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah provinsi Jawa Barat.

Menurut riset Sesuai dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, maka metode pelaksanaan difokuskan pada moda dalam jaringan (daring). Pelaksanaan luring akan dipertimbangkan dengan keadaan kondisi khusus program atau kebijakan pimpinan lembaga sesuai arahan Satgas COVID-19. Namun demikian, tetap disiapkan juga metode pelaksanaan alternatif lainnya seperti blended learning dan tatap muka. Pengembangan media pembelajaran terbagi atas 3 area yakni

1. Infrastruktur Pembelajaran
2. Materi Pembelajaran, dan
3. Pengembangan Media Pembelajaran

### 1.1. KONDISI UMUM

BBGP Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal diundangkan yaitu 5 April 2022, memiliki peran penting dalam mengembangkan model peningkatan kompetensi dan media pembelajaran, meningkatkan kompetensi serta memberdayakan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di Propinsi Jawa Barat untuk pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Sebagaimana dalam tugas dan fungsi dari BBGP Propinsi Jawa Barat yang tertuang pada Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola BBGP dan BGP, yaitu:





**Gambar 1.4**

*Pelatihan Pembelajaran Literasi & Numerasi dalam Kurikulum Merdeka:*



**Gambar 1.5**

*Semarak Karya Transformasi Pendidikan berbasis Komunitas Belajar*



**Gambar 1.6**

*Bp. Romy Satria Lesmana, MT., Kepala Bagian Umum BBGP Prov. Jabar.*

1. Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
3. Pengembangan media pembelajaran guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
5. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
8. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
9. Pelaksanaan urusan administrasi.

Maka Renstra ini merupakan acuan pelaksanaan program lembaga dalam mendukung realisasi dan pencapaian kinerja BBGP Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja BBGP Prov. Jabar tahun 2022-2024.

## 1.2. GAMBARAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam kurun waktu 2020-2022, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari program guru dan tenaga kependidikan dengan capaian kinerja program guru dan tenaga kependidikan yang diukur menggunakan indikator kinerja sesuai target sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Secara umum, capaian renstra PPPPTK IPA, PPPPTK TK dan PLB dan PPPPTK Penjas dan BK tahun 2020-2022 mencapai target yang ditetapkan dan sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam arti realisasi melebihi target yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi GTK. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk perbaikan kualitas program yang berkaitan dengan standar guru dan penataan guru sesuai dengan wewenang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2953/B/PR.00.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024, telah disebutkan bahwa pencapaian dan tujuan BBGP Provinsi Jawa Barat yang baru dibentuk pada tahun 2022 dengan pencapaian sasaran dan tujuan tahun 2020-2022 pada PPPPTK IPA, PPPPTK TK dan PLB dan PPPPTK Penjas dan BK dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Gambar 1.7**  
Science Nyentrik pada Program  
Kareta Sobat di Cianjur

Tabel 1.1  
Target dan Capaian P4TK TK dan PLB Tahun 2020 - 2021

SATKER PPPPTK TK DAN PLB	2020					2021				
	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra
<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	4.360 Orang	4.873 Orang	111.77%	51.390 Orang	9.48%	9.429 Orang	11.349 Orang	120.36%	21.616 Orang	74.88%
Jumlah Kepala Sekolah Yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	2.560 Orang	2.913 Orang	113.83%							
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP)	-	-	-			5.986 Orang	6.146 Orang	102.67%		
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Program guru Penggerak	1.300 Orang	1.375 Orang	105.77%			3.329 Orang	5.076 Orang	152.48%		
Jumlah Guru Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Guru Bidang TK, PLB, dan Inklusi (PKB-BPD)	500 Orang	585 Orang	117.00%			114 Orang	127 Orang	111.40%		
Jumlah Model Inovasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Model	38 Model	100%			1 Model	4 Model	100%		
<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	95.12%	A	97.07%	BB	A	109.21%	A	97.07%
Predikat SAKIP PPPPTK TK dan PLB	BB	BB	95.12%	A	97.07%	BB	A	109.21%	A	97.07%
IKK2.2 Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Sateker Minimal 93	93.0	92.80	99.78%	93.8	97.24%	93.2	92.64	99.40%	93.8	97.24%
Nilai Kinerja Anggaran PPPPTK TK dan PLB Atas Pelaksanaan RKA-K/L	93	92.8	99.78%	93.8	97.24%	93.2	92.64	99.40%	93.8	97.24%

Sumber: SAKIP P4TK TK dan PLB Tahun 2020 - 2021

Tabel 1.2  
Target dan Capaian P4TK IPA Tahun 2020 - 2021

SATKER PPPPTK IPA	2020					2021				
	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra
<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	5,766	10,462	181.44%	5750	100.28%	5,622	6,778	120.56%	5,750	97.77%
<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB						BB	A			
IKK2.2 Rarta-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Sateker Minimal 93						93.2	98.25			

Sumber: SAKIP P4TK IPA Tahun 2020 - 2021

Tabel 1.3  
Target dan Capaian P4TK Penjas dan BK Tahun 2020 - 2021

SATKER PPPPTK PENJAS DAN BK	2020					2021				
	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra
<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	2.605 Orang	3.935 Orang	151.06%	63.192 Orang	6.23%	3.537 Orang	8.593 Orang	242.94%	8.583 Orang	100.12%
Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang PenjasKes dan BK	652 Orang	685 Orang	105.06%							
Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi	1.800 Orang	3.064 Orang	170.22%							
Guru Kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang Tematik	153 Orang	186 Orang	121.57%							
Model-Model (Inovasi) peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Model	1 Model	100.00%							
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						202 Orang	433 Orang	214.36%		
Pelatihan Bidang Pendidikan						3.335 Orang	8.160 Orang	244.68%		
Penelitian dan Pengembangan Modeling						1 Model	1 Model	100.00%		
<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>										
IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A	A	100.00%			A	A	100.00%		
IKK2.2 Rarta-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Sateker Minimal 93	93.00	93.98	101.05%			93.20	93.99	100.85%		

Sumber: SAKIP P4TK Penjas dan BK Tahun 2020 - 2021

Pada tabel tersebut di atas, ke 3 (tiga) satuan kerja telah mencapai predikat SAKIP A dan rata-rata kinerja di atas 90%. Dalam hal ini, satuan kerja telah memiliki kinerja baik dan capaian program di atas target yang telah ditetapkan. Pemenuhan target dan capaian kinerja lembaga, dapat menjadi baseline bagi satuak kerja baru yakni BBGP Provinsi Jawa Barat.

Adapun target yang telah dicapai oleh ke 3 (tiga) lembaga dimaksud pada tahun 2022, dimana likuidasi terhadap satuan kerja PPPPTK TK dan PLB, PPPPTK IPA dan PPPPTK Penjas dan BK pada bulan Agustus 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 1.4  
Target dan Capaian P4TK TK dan PLB per Agustus Tahun 2022

SATKER PPPPTK TK DAN PLB	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
	<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
KK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	KK1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	4.986 Orang	9.949 Orang	199.54%
Jumlah Kepala Sekolah Yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	KK1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	682 Orang	-	-
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP)	KK1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	4.439 Orang	1.736 Orang	39.11%
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Program guru Penggerak	<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
Jumlah Guru Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Guru Bidang TK, PLB, dan Inklusi (PKB-BPD)	IKK 2.1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A	-	-
Jumlah Model Inovasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	IKK 2.2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	91.46	-	-
Predikat SAKIP PPPPTK TK dan PLB	IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			
IKK2.2 Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93				
Nilai Kinerja Anggaran PPPPTK TK dan PLB Atas Pelaksanaan RKA-K/L				

Sumber: SAKIP P4TK TK dan PLB Tahun 2022

Tabel 1.5  
Target dan Capaian P4TK IPA per Agustus Tahun 2022

SATKER PPPPTK IPA	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
	<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
IKK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	IKK1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	5.702	11.368	204.10%
SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	KK1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	100	-	0.00%
	KK1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	2.401	1.986	82.72%
	<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK 2.1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A	-	-
IKK2.2 Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93	IKK 2.2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	91.46	-	-

Sumber: SAKIP P4TK IPA Tahun 2022

Tabel 1.6  
Target dan Capaian P4TK Penjas dan BK per Agustus Tahun 2022

SATKER PPPPTK PENJAS DAN BK	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
	<b>SK1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
IKK1.1 Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	KK1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	6.709 Orang	4.901 Orang	73.15%
Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang Penjaskes dan BK	KK1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	100 Orang	0	0
Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi	KK1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	333 Orang	433 Orang	130.03%
Guru Kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang Tematik				
Model-Model (Inovasi) peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
Pelatihan Bidang Pendidikan				
Penelitian dan Pengembangan Modeling				
	<b>SK2 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</b>			
IKK2.1 Rata-Rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK 2.1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A	-	-

Sumber: SAKIP P4TK Penjas dan BK Tahun 2022



Gambar 1.8 Semarak Transformasi Pendidikan berbasis Komunitas Belajar 2022

### 1.3. ISU-ISU STRATEGIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

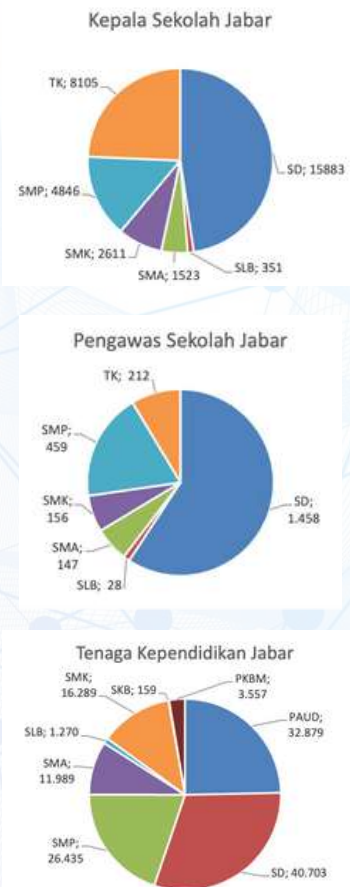
Sebagai lembaga yang baru berdiri, BBGP Provinsi Jawa Barat telah melakukan identifikasi sumber daya dan sasaran kerja lembaga di 27 Kabupaten/Kota pada provinsi Jawa Barat. Sesuai data Dapodik Kemdikbud 2022 tercatat sebanyak 653.960 Guru dan Tenaga Kependidikan di provinsi Jawa Barat selalu pelaku pembelajaran pada Pendidikan formal dan Pendidikan non formal. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 1.7 Data GTK Formal dan Non Formal di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: Kepegawaian BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

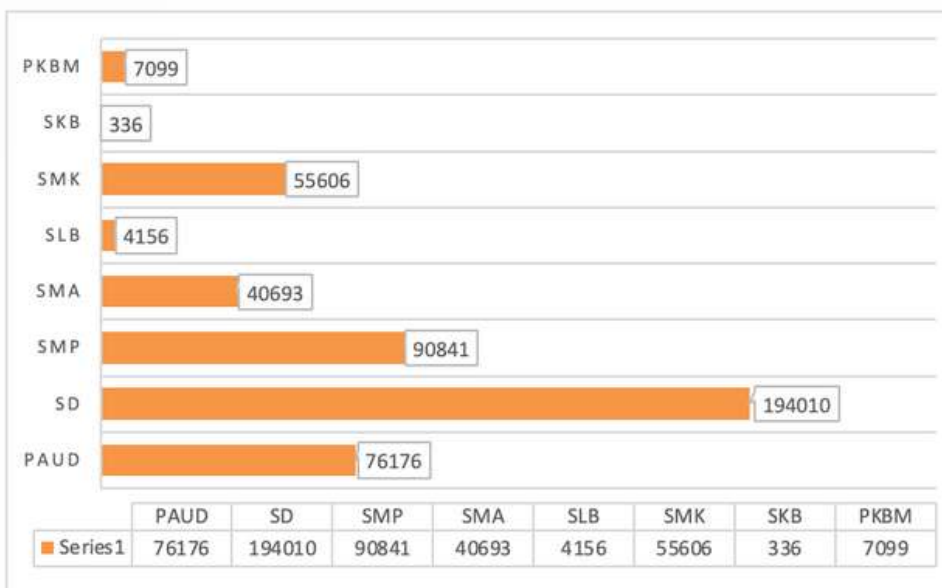
Tabel 1.8 Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan sesuai jenjang di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 1.9

Sebaran jumlah guru sesuai jenjang pendidikan formal dan non formal di Prov. Jabar Tahun 2022



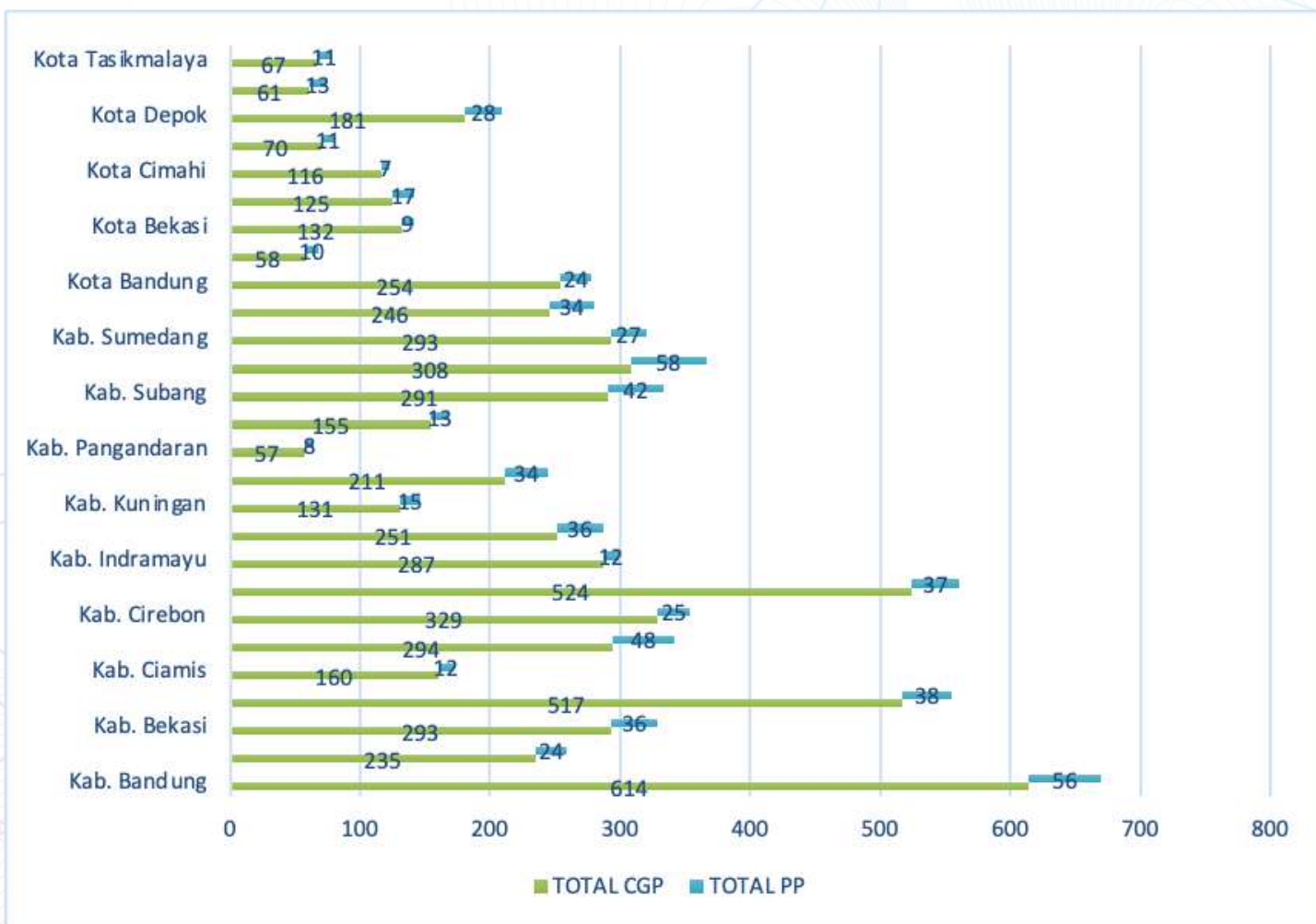
Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022



Selain itu juga terkait dengan pelaksanaan program nasional yaitu Program Pendidikan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, untuk provinsi Jawa Barat telah terlibat sebanyak 27 Kabupaten/Kota dengan sebaran sebagaimana data berikut ini

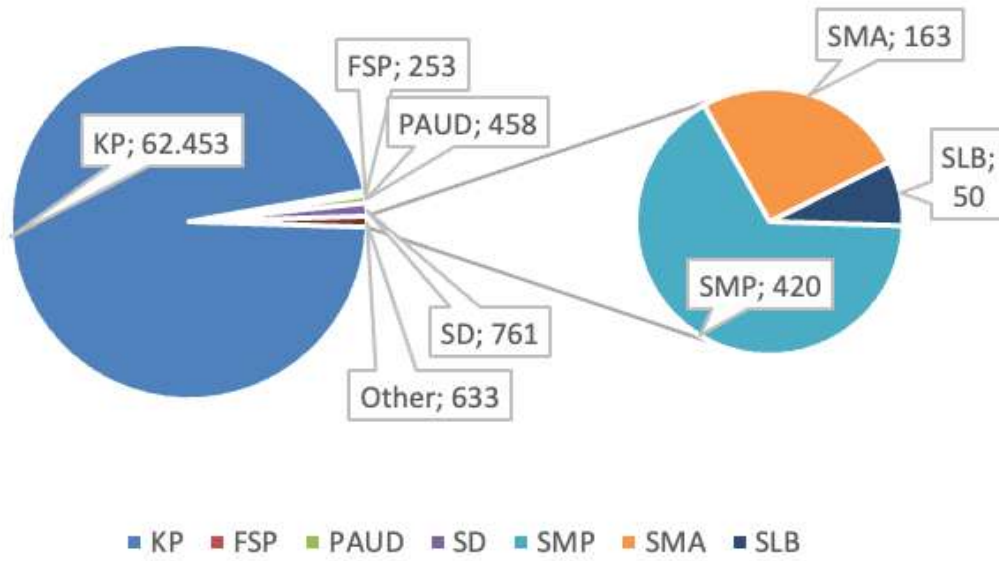
Tabel 1.10

Sebaran data Pengajar Praktik dan Guru Penggerak per Kab/Kota di Prov. Jabar Tahun 2022



Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 1.11  
Sebaran data Fasilitator dan Kepala Sekolah Penggerak per Kab/Kota di Prov. Jabar Tahun 2022



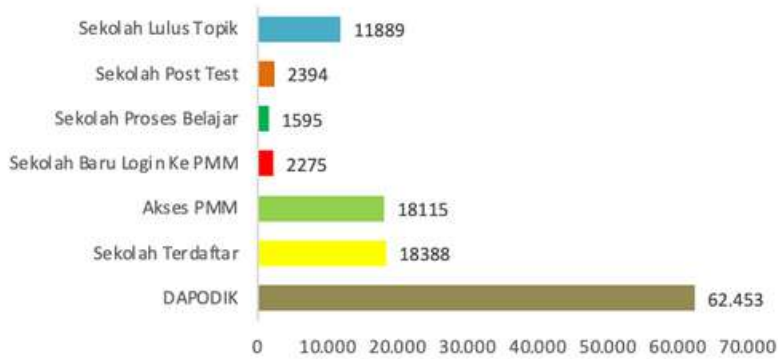
Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 1.12  
Rekapitulasi Sekolah Penggerak per Kab/Kota di Prov. Jabar Tahun 2022 versi PMM



Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 1.13  
Rekapitulasi Sekolah Pelaksana IKM di Prov. Jabar Tahun 2022



Sumber: Data GTK BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Sementara itu juga telah dilakukan juga program peningkatan kompetensi bagi GTK Provinsi Jawa Barat melalui Bidang IPA, Bidang TK dan PLB dan Bidang Penjas dan BK. Program-program dimaksud merupakan program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2022, baik berupa Hard-skill maupun Soft-skill yang dapat dilihat pada data berikut ini,

Tabel 1.14  
Program Pelatihan Guru Bidang TK dan PLB 2021

No	Nama Kegiatan	Moda	Rekrutmen	Jumlah Sasaran
1	PKB BPD 8 Diklat TK, PLB dan Inklusi	Dalam Jaringan	Terbuka	360 orang
2	PKB BPD 8 Diklat TK, PLB dan Inklusi	Tatap Muka	Guru Penggerak Angkatan 1 Bidang TK	140 peserta
3	Pelatihan Penguatan Materi Guru Penggerak Angkatan 1	Tatap Muka	Guru Penggerak Angkatan 1	476 peserta
4	Pelatihan Penguatan Materi Kepemimpinan dan Motivasi bagi Pendamping Guru Penggerak Angkatan 1	Tatap Muka	Pendamping PGP Angkatan 1	98 peserta
5	Pelatihan Pendidikan Inklusi	Tatap Muka	Guru pada SPPI	100 peserta
6	Pelatihan Konsep Merdeka Belajar Pengimbasan Guru PGP Angkatan 1	Tatap Muka	Guru pada 8 Kabupaten / Kota Sasaran PGP Angkatan 1	800 peserta

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 1.15  
Program Pelatihan Tenaga Kependidikan Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Moda	Rekrutmen	Jumlah Sasaran
1	Seleksi Substansi BCKS	Daring / Daring Kombinasi / TM	Pengajuan Pemerintah Daerah	1000 orang
2	Seleksi Substansi BCPS	Daring / Daring Kombinasi / TM	Pengajuan Pemerintah Daerah	100 orang
3	Diklat CKS	Daring / Daring Kombinasi / TM	Pengajuan Pemerintah Daerah	1500 orang
4	Diklat CKS	Daring / Daring Kombinasi / TM	Pengajuan Pemerintah Daerah	150 orang
5	Diklat Penguatan Konsep Merdeka Belajar	Tatap Muka	Kabupaten Aceh Utara	150 orang

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022



Menindaklanjuti capaian pelaksanaan program nasional maupun program lembaga dan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBGP Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditetapkan beberapa isu strategis pelaksanaan program peningkatan kompetensi GTK di provinsi Jawa Barat sebagai berikut,

**1** Program guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran melalui program PSP

Pelaksanaan program PSP yang memasuki Angkatan ke 2 dan 3 memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan satuan pendidikan di kabupaten/kota untuk mewujudkan merdeka belajar dan membangun profil pelajar Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diketahui bahwa telah dicapai 2.095 satuan pendidikan yang terlibat program dimaksud, dengan 62.453 GTK yang terlibat pada program ini. Perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan ketercapaian program dan bekerjasama dengan pemerintah daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu menjadi penting dilakukan koordinasi dengan instansi terkait serta berbagi peran termasuk dengan BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Barat selaku PMO (Program Management Office ) untuk Prov. Jabar.

Sesuai dengan mandat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada DIPA BBGP Jabar terdapat anggaran SEAMEO QITEP in Science dan SEAMEO QITEP in Language. Pembahasan rinci mengenai kedua organisasi ini akan dibahas pada Bab V.

**2** Program guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru melalui program PGP.

Sampai dengan tahun 2022 telah diselesaikan program PGP sampai dengan Angkatan ke-4 dan masih dilaksanakan untuk Angkatan 5, 6 dan 7 sebanyak 1.759 GP (Guru Penggerak) dan 4.454 orang saat ini masih berstatus CGP. Untuk itu perlu terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, ...

... agar minat GTK untuk mengikuti program PGP meningkat dan dapat mencapai target nasional sehingga provinsi Jabar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi semua murid.

Selain itu juga perlu dilakukan secara terus menerus pengembangan informasi, keterampilan dan kemampuan mengajar serta pengelolaan pembelajaran pada satuan Pendidikan bagi GTK di provinsi Jabar. Maka diperlukan program-program pendukung yang dapat memberikan peluang bagi GTK untuk meningkatkan kompetensinya.

**3** Program guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi melalui program IKM

Salah satu kunci sukses mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah melaksanakan merdeka belajar pada satuan pendidikan yang akan berimbas pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, implementasi kurikulum merdeka menjadi penting untuk menunjang pembelajaran pada siswa. Maka capaian implementasi kurikulum merdeka diukur dari jumlah sekolah yang sudah menerapkan dan menggunakan platform merdeka mengajar sebagai pusat data, referensi dan dokumentasi bagi GTK dan satuan pendidikan. Saat ini telah dicapai 18.388 sekolah yang telah terdaftar sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka dan sebanyak 11.889 sekolah telah lulus topik dan telah aktif menggunakannya. Peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan terhadap manajemen sekolah perlu ditingkatkan agar pemahaman akan merdeka mengajar dapat terwujud. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh provinsi, kabupaten dan kota akan sangat diperlukan untuk menjadi acuan bagi GTK dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa.



## 4 Program dukungan manajemen

Penyelenggaraan administrasi instansi dalam melaksanakan program nasional maupun program lembaga, serta dalam mewujudkan Good Governance, memerlukan perhatian khusus. Lembaga perlu melaksanakan pengelolaan kantor secara transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan core value ASN yakni BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sehingga capaian kinerja Lembaga dapat sesuai target.

### 1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pada poin sebelumnya telah dilakukan identifikasi isu strategis yang menjadi fokus pengembangan dan implementasi pelaksanaan program nasional dan program lembaga. Untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan mitigasi terhadap permasalahan, analisis dan potensi yang ada di BBGP Provinsi Jawa Barat.

#### 1.4.1 PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan peningkatan kompetensi GTK formal dan non-formal di provinsi Jawa Barat terbagi atas 2 (dua) permasalahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### ●●● Permasalahan Eksternal

Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena : a) masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum; b) masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik; c) masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan d) masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

Pengembangan keprofesionalitas guru masih harus dioptimalkan. Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (peer learning) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru.

Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan: a) belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru; b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan; c) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap kabupaten/kota.

Tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan yang berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program yaitu tantangan untuk memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pada abad 21 ini, peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik.



Dengan adanya penekanan pada guru sebagai fasilitator pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar terjadi pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Sebagai fasilitator pembelajaran, maka guru diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan eksternal lembaga sebagai berikut,

1. Proses pengajaran dan pembelajaran belum optimal dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,
2. Pengembangan keprofesian guru sesuai bidangnya belum didukung oleh inovasi pembelajaran secara optimal,

Sebagai lembaga baru, BBGP Provinsi Jawa Barat perlu mengidentifikasi diri dalam tugasnya sehingga peran yang diharapkan dalam masyarakat pendidikan di provinsi Jawa Barat dapat dikenali dengan signifikan. Identitas BBGP Provinsi Jawa Barat, sangat ditunggu oleh stakeholder dengan harapan penuh untuk memajukan pendidikan sesuai bidangnya. Komunikasi dan kolaborasi yang pernah terjalin sebelumnya dengan stakeholder, menjadi standar pencapaian minimal BBGP Provinsi Jawa Barat untuk mewarnai kinerja lembaga ke depan. Dengan pengelolaan Lembaga dan GTK yang baru bertumbuh, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi BBGP Provinsi Jawa Barat sehingga tantangan ini tidak hanya menuntut pengelolaan yang baik namun juga layanan prima dalam semua aspeknya.

### ●●● Permasalahan Internal

Dalam pengelolaan organisasi baru yang dibentuk pada pertengahan tahun 2022, BBGP Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa permasalahan terkait akan 3 (tiga) hal sebagai berikut,

Dalam pengelolaan organisasi baru yang dibentuk pada pertengahan tahun 2022, BBGP Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa permasalahan terkait akan 3 (tiga) hal sebagai berikut,

#### a. Tata Kelola Organisasi

Pembentukan organisasi baru yakni BBGP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak, menjadi tonggak baru bagi lembaga untuk membangun tata kelola sesuai dengan amanat tugas dan fungsinya. Rancangan organisasi, pengaturan SDM dan penataan organisasi menjadi prioritas awal untuk lembaga yang baru saja lahir tersebut. Penyatuan 3 lembaga menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian manajemen lembaga untuk menyusun tata kelola organisasinya. Tata kelola organisasi yang baik (good organization governance – GOG) dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Untuk mewujudkannya perlu mengidentifikasi permasalahan dengan memperhatikan beberapa hal yakni, kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian. Organisasi harus membangun sistem dan pedoman tata kelola organisasi yang terintegrasi. Pegawai pun harus dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan apa yang akan dijalankan organisasi. Hal ini yang menjadi tantangan BBGP Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan secara kontinyu terhadap proses-proses yang terjadi dalam sistem tata kelola yang sudah dibuat. Sehingga penyatuan pola pikir, budaya kerja, penyamaan persepsi, membangun integritas dapat terjadi dalam lembaga yang baru.



**Gambar 1.10**

*Agenda Dongeng pada Program Karetasobat di acara Semarak Transformasi Pendidikan berbasis Komunitas Belajar*

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Pelaksanaan perubahan sistem kerja di BBGP Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Organisasi dengan sistem kerja kolaboratif dan dinamis (Agile Organization).

b. Jumlah pegawai melebihi peta jabatan yang tersedia

Penggabungan 3 lembaga menyebabkan kelebihan jumlah pegawai. Untuk sebuah lembaga dengan wilayah kerja provinsi Jawa Barat peta jabatan pegawai yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pegawainya, sehingga perlu proses pemetaan jabatan lebih detil dan melakukan identifikasi penugasan pegawai berdasarkan hasil asesmen dan kompetensi pegawai. Pengembangan tugas dan fungsi dari lembaga dapat menjadi salah satu aspek untuk mengatasi hal ini, selain dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) pada BBGP atau UPT di lingkungan Kemdikbud ristek lainnya.

Mengukur efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan lembaga yang mengembangkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, fungsi pengembangan model dan penelitian dapat juga mengoptimalkan SDM yang ada. Pencapaian pemetaan SDM secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi lembaga dapat juga dicapai dengan merencanakan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan prediksi angka pensiun, sehingga pencapaian akan direncanakan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan mengusung semangat ASN BERAKHLAK 2024, pengelolaan pegawai di lembaga perlu mendapat perhatian agar kinerja lembaga dapat dicapai secara optimal.

c. Penyatuan budaya kerja organisasi

Budaya kerja organisasi dengan latar belakang kondisi budaya, pendidikan, ruang gerak organisasi sebelumnya, menjadi tantangan dalam proses penyatuan organisasi. Dari berbagai aspek perlu penyatuan dan dipikirkan secara terinci dan holistik sehingga budaya kerja organisasi baru dapat dibentuk. Kesiapan SDM dalam menerima perubahan menjadi kunci utama dalam proses dimaksud. Tahapan-tahapan yang diperlukan harus dilalui bersama dengan mengupas hal-hal yang dianggap penting. Peran kepala lembaga sebagai sentral komando penyatuan 3 lembaga dimaksud harus berpegang pada visi dan misi Lembaga yang sudah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi. Membangun proses bisnis dimulai dari makro menuju ke mikro dalam lembaga, dapat memberikan arah yang jelas sehingga setiap lini akan menyusun proses bisnisnya sesuai dengan garis koordinaasi yang diperlukan.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja BBGP Jawa Barat / belum optimalnya penggunaan SPBE dalam mendukung sistem kerja BBGP Jawa Barat. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja kolaboratif (Agile Organization) salah satunya dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan dukungan penting yang akan mendorong pencapaian transformasi di BBGP Jawa Barat.

e. Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK

Hasil survey internalisasi BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kemenpanrb tahun 2022 di tingkat kementerian menunjukkan masih rendahnya nilai Harmonis (49,6) dan Adaptif (44,6). Hal ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi BBGP Jawa Barat dalam melakukan tranformasi organisasi.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan internal Lembaga sebagai berikut,

1. Pemenuhan target perolehan predikat SAKIP sebagai organisasi baru.
2. Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM dalam pengelolaan Tata Kelola Lembaga.
3. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran dalam pelaksanaan RKAKL sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan internal Lembaga sebagai berikut :

1. Tata Kelola Organisasi
2. Jumlah pegawai melebihi peta jabatan yang tersedia
3. Penyatuan budaya kerja organisasi
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung sistem kerja BBGP Jawa Barat/ belum optimalnya penggunaan SPBE dalam mendukung sistem kerja BBGP Jawa Barat.
5. Internalisasi Budaya Kerja Berahlak

Permasalahan di atas akan berimbas kepada :

1. Pemenuhan target perolehan predikat SAKIP sebagai organisasi baru.
2. Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM dalam pengelolaan Tata Kelola Lembaga.
3. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran dalam pelaksanaan RKAKL sesuai target yang ditetapkan.

#### 1.4.2 ANALISA MASALAH

Dalam menyusun strategi pengelolaan lembaga, dilakukan analisa dalam berbagai aspek sebagai bahan referensi dan rekomendasi pengambilan keputusan dan penetapan langkah selanjutnya. Untuk mencari solusi permasalahan di atas, maka dilakukan analisis permasalahan dengan menggunakan teknik SWOT sebagai berikut,



**Gambar 1.11**

*Arung Jeram pada Capacity Building  
Pegawai, Ciater 2023*

# 1 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BELUM OPTIMAL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM MERDEKA,



1. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional yang mempunyai latar belakang pendidikan berbagai mapel, kompeten dan berpengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan pembelajaran.
2. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional yang kompeten dan berpengalaman dalam mengembangkan desain pelatihan dalam berbagai moda penyelenggaraan.
3. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional umum yang kompeten dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi.
4. BBGP Prov. Jabar memiliki sarana dan prasarana pendukung pelatihan yang memadai dan lokasi yang strategis.



1. Tenaga fungsional tertentu belum semua dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mendalam.
2. Tenaga fungsional tertentu sudah lama tidak melakukan pembaharuan kompetensinya terkait dengan bidang mata pelajaran atau bidangnya.
3. Tidak semua tenaga fungsional tertentu terlibat dalam pembelajaran di Satuan Pendidikan sesuai bidang mata pelajaran atau bidangnya, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka.
4. Tenaga fungsional umum belum teridentifikasi dan ditetapkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.
5. Belum terjalin hubungan yang harmonis antara BBGP Prov. Jabar dengan pemangku kepentingan.
6. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan aktifitas organisasi.



1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pendidikan.
2. Semangat tinggi pendidik dan tenaga kependidikan untuk segera mengimplementasikan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan.
3. Animo pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang sangat tinggi pada jenjang Pendidikan Formal dan Non Formal termasuk Pendidikan Inklusi.
4. Berbagai macam media, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam berbagai moda dan metode, dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Pemanfaatan tenaga fungsional umum yang jumlahnya banyak untuk terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kurikulum merdeka sesuai dengan kecakapannya.



1. Kebijakan daerah tentang penerapan kurikulum merdeka yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat.
2. Bertumbuh dan berkembangnya penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan sesuai hasil belajar mandiri pada platform merdeka mengajar.
3. Retensi GTK terhadap perubahan kurikulum.
4. Budaya kerja dan proses bisnis organisasi baru belum terbentuk.
5. Sikap skeptis pemangku kepentingan akibat belum terjalin hubungan yang baik.

# 2

## PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU SESUAI BIDANGNYA BELUM DIDUKUNG OLEH INOVASI PEMBELAJARAN SECARA OPTIMAL,



1. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional yang mempunyai latar belakang pendidikan berbagai mapel, kompeten dan berpengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan pembelajaran.
2. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan penelitian dan mengembangkan desain pelatihan dalam berbagai moda penyelenggaraan.
3. BBGP Prov. Jabar memiliki tenaga fungsional umum yang kompeten dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi.
4. BBGP Prov. Jabar memiliki sarana dan prasarana pendukung pelatihan yang memadai dan lokasi yang strategis.



1. Tenaga fungsional tertentu belum terbuka wawasan dan kurang memahami konsep pembelajaran terkini sesuai dengan kebijakan merdeka belajar Kemdikbudristek.
2. Rendahnya motivasi tenaga fungsional dalam mengembangkan model dan metode diklat inovasi pembelajaran.
3. Tenaga fungsional umum belum teridentifikasi dan terpetakan sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.
4. Belum terjalin hubungan yang harmonis antara BBGP Prov. Jabar dengan pemangku kepentingan.
5. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan aktifitas organisasi.
6. BBGP Prov. Jabar belum mengelola GTK Nonformal dengan baik.



1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pendidikan.
2. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan peluang kepada seluruh tenaga fungsional (widyaiswara) untuk mengembangkan model dan metode diklat inovasi pembelajaran.
3. Animo pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang sangat tinggi pada jenjang Pendidikan Formal dan Non Formal termasuk Pendidikan Inklusi.
4. Berbagai macam media, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam berbagai moda dan metode, dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Pemanfaatan tenaga fungsional umum yang jumlahnya banyak untuk terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi GTK sesuai dengan kecakapannya.



1. Kebijakan daerah tentang peningkatan kompetensi GTK dapat memperoleh layanan di luar BBGP Prov. Jabar.
2. Bertumbuh dan berkembangnya model peningkatan kompetensi oleh pengembang di luar Kemdikbudristek.
3. Retensi GTK terhadap layanan Lembaga yang belum optimal.
4. Budaya kerja dan proses bisnis organisasi baru belum terbentuk
5. Sikap skeptis pemangku kepentingan akibat belum terjalin hubungan yang baik.

### 3 PEMENUHAN TARGET PEROLEHAN PREDIKAT SAKIP SEBAGAI ORGANISASI BARU,



1. BBGP Prov. Jabar memiliki memiliki SDM unggul yang menangani SAKIP.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung keterlaksanaan penyelenggaraan SAKIP.
3. Adanya dukungan lembaga terhadap peningkatan predikat SAKIP.



1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan kurangnya pemahaman petugas pada unit lain untuk mendukung kebutuhan data laporan kinerja Lembaga.
2. Belum tersedia unit yang bertanggungjawab sebagai pusat pengelolaan data secara komprehensif terhadap perkembangan anggaran, capaian target sasaran dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan program Lembaga.
3. Belum tersedianya media penghubung sebagai pusat system kebutuhan data laporan kinerja Lembaga.



1. Adanya kebijakan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pencapaian Nilai SAKIP Lembaga dengan predikat A.
2. Tersedianya aplikasi pengukuran kinerja lembaga yang terintegrasi dalam SPASIKITA.
3. Optimalisasi kecakapan tenaga fungsional umum untuk terlibat dalam pengelolaan dan pencapaian Nilai SAKIP Lembaga



1. Informasi kebijakan terbaru tentang SAKIP sering terlambat.
2. Akses ke aplikasi pengukuran kinerja sering terganggu.
3. Rasa puas akan capaian yang sudah diperoleh dan menghalangi untuk melakukan inovasi pencapaian lebih tinggi.

### 4 PEROLEHAN PREDIKAT ZI-WBK/WBBM DALAM PENGELOLAAN TATA KELOLA LEMBAGA,



1. BBGP Prov. Jabart merupakan gabungan dari 3 (tiga) Satuan kerja yang memiliki pengalaman dalam penilaian satker menuju ZI-WBK pada tahun sebelumnya.
2. Sudah dibentuknya Tim ZI-WBK yang menangani setiap area perubahan.
3. Sarana dan Prasarana yang mendukung pembangunan dan implementasi ZI-WBK.



1. Kurangnya komitmen jajaran manajemen dan pegawai dalam pelaksanaan pembangunan ZI-WBK.
2. Kurangnya data dukung pelaksanaan pembangunan ZIWBK.
3. Rendahnya pemahaman pegawai dalam pelaksanaan pembangunan ZI-WBK



- 1. Organisasi BBGP Prov. Jabar diusulkan untuk meraih predikat ZI-WBK pada tahun 2023



- 1. Masih banyak satker di lingkungan Kemendikbud Ristek yang akan bersaing dalam memperoleh sertifikat ZI-WBK.
- 2. Retensi Internal organisasi internal
- 3. Perubahan mind-set pegawai internal belum terjadi menyeluruh yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pegawai tentang konsep ZI-WBK

## 5 PEROLEHAN NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DALAM PELAKSANAAN RKAKL SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN,



- 1. BBGP Prov. Jabar memiliki SDM unggul yang menangani NKA.
- 2. Sarana dan Prasarana yang meraih perolehan NKA sesuai target yang ditetapkan
- 3. Adanya dukungan lembaga terhadap Perolehan NKA sesuai target yang ditetapkan



- 1. Kurangnya ketelitian petugas keuangan dalam melaksanakan tugas.
- 2. Rendahnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan tugas terkait dengan penilaian kinerja anggaran
- 3. Penanganan permasalahan kondisi keuangan yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap penilaian kinerja anggaran



- 1. Tersedianya kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai pengaruh dan membantu perolehan NKA
- 2. Tersedianya aplikasi dan media pelaksanaan anggaran yang membantu penilaian kinerja anggaran sesuai target



- 1. Kondisi aplikasi tidak bekerja karena sedang dalam perawatan.
- 2. Beban kerja terlalu berat pada petugas yang menyebabkan kesalahan manusia dalam bekerja

Gambar 1.12 Paintballs Game pada Capacity Building Pegawai, Ciater 2023



### 1.4.3 POTENSI

Sebagaimana diketahui bahwa BBGP Prov. Jabar merupakan penggabungan dari 3 (tiga) P4TK, sehingga dapat diidentifikasi aset dari masing-masing P4TK sebagai potensi kekuatan internal bagi organisasi. Adapun potensi dimaksud adalah,

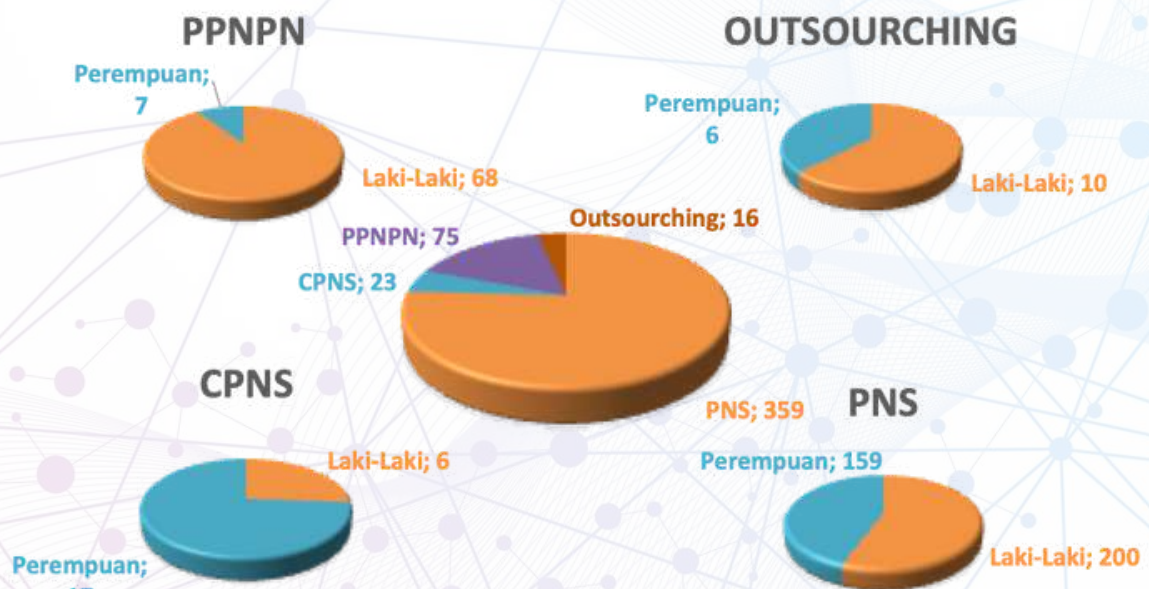
#### a. Sumber Daya Manusia

BBGP Provinsi Jawa Barat dibentuk dari 3 Unit Pelaksana Teknis PPPPTK IPA, PPPPTK TK dan PLB dan PPPPTK Penjas dan BK, dimana ketiga satuan kerja dimaksud melakukan peleburan Sumber Daya dan membangun Struktur Organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran, dimaksudkan untuk mengelola GTK di Provinsi Jawa Barat baik ASN, non ASN, dan PPPK. Adapun sebaran data dimaksud adalah sebagai berikut,



Gambar 1.13 Gebyar Filtrasi, Bogor 2022

Tabel 1.16  
Data Pegawai BBGP Jawa Barat 2022



Sumber: Kepegawaian BBGP Prov. Jabar Tahun 2022



Penggabungan 3 (tiga) instansi menjadi 1 instansi memberikan tantangan dalam pengelolaan SDM dengan latar belakang budaya kerja, ritme dan komitmen bekerja yang berbeda. Menjadi tugas bagi organisasi untuk menyatukan visi bersama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang baru di bawah BBGP Provinsi Jawa Barat. Membentuk state of being yang baru, dan tuntutan untuk segera mampu bersinergi menjalankan seluruh program dan kegiatan yang telah diamanahkan kepada BBGP provinsi Jawa Barat. Untuk membangun state of being dalam organisasi baru diperlukan komunikasi dan koordinasi dalam menetapkan secara bersama-sama nilai-nilai lembaga, proses bisnis, budaya kerja dan standar layanan yang nantinya akan terinternalisasi dalam tubuh BBGP Provinsi Jabar agar reformasi birokrasi internal dapat diwujudkan.

Selain itu juga perlu dipetakan SDM yang dibutuhkan oleh Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Analisa jabatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pemetaan dimaksud tentunya dengan mempertimbangkan kompetensi dasar PNS/ASN sesuai peraturan MenPAN dan RB dan BKN, mengacu pada optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga dalam melayani sasaran GTK di Provinsi Jawa Barat.

#### b. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Sesjen tentang penetapan asset eks PPPPTK Penjas dan BK, PPPPTK IPA dan PPPPTK TK dan PLB serta Permendikbud Nomor 14 Tahun 2021 tentang OTK BBGP dan BGP, BBGP Prov. Jabar telah ditetapkan di kantor eks PPPPTK IPA di Jl. Diponegoro No.12 Bandung sebagai kantor pusat dan kantor eks PPPPTK TK dan PLB di Jl. Cipto 9 Bandung sebagai kantor pendukung. Kedua lokasi kantor dimaksud dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti Kamar Asrama, Laboratorium, Ruang Kelas, Aula, Ruang Rapat serta Ruang Kantor. Pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan asset bangunan dan non bangunan pada kedua kantor dimaksud menjadi tanggungjawab BBGP Prov. Jabar dalam setiap tahun anggarannya sampai dengan adanya kebijakan perubahan.

Aset penting lainnya adalah kendaraan, alat pengolah data dan perangkat digital lainnya yang menjadi aset ke 3 (tiga) PPPPTK, telah dilimpahkan menjadi bagian dari BBGP Prov. Jabar. Tercatat berbagai media digital yang telah aktif digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama pandemi Covid 19 maupun paska pandemi. Berbagai aset aplikasi yang sudah dibangun menjadi aset BBGP Prov. Jabar seperti : Teman IPA, DiDamba, DeMikroskop, SiMaddu, SIMPek PTK, E-Training, Pahlawan, SIMPAN, SIMPeg, TrainPass dan SIMon BanPem KaSep, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dalam menunjang berbagai aktifitas baik bagi kepegawaian maupun layanan external.



Gambar 1.15  
Semarak Transformasi Pendidikan berbasis Komunitas Belajar

### c. Program Unggulan

Pengembangan program unggulan di 3 (tiga) eks PPPPTK sesuai dengan bidang dan wilayah kerja masing-masing, akan menjadi kekayaan bagi BBGP Prov. Jabar Berbagai program unggulan PPPPTK IPA dan PPPPTK TK dan PLB yang dapat di lanjutkan di BBGP Jabar.

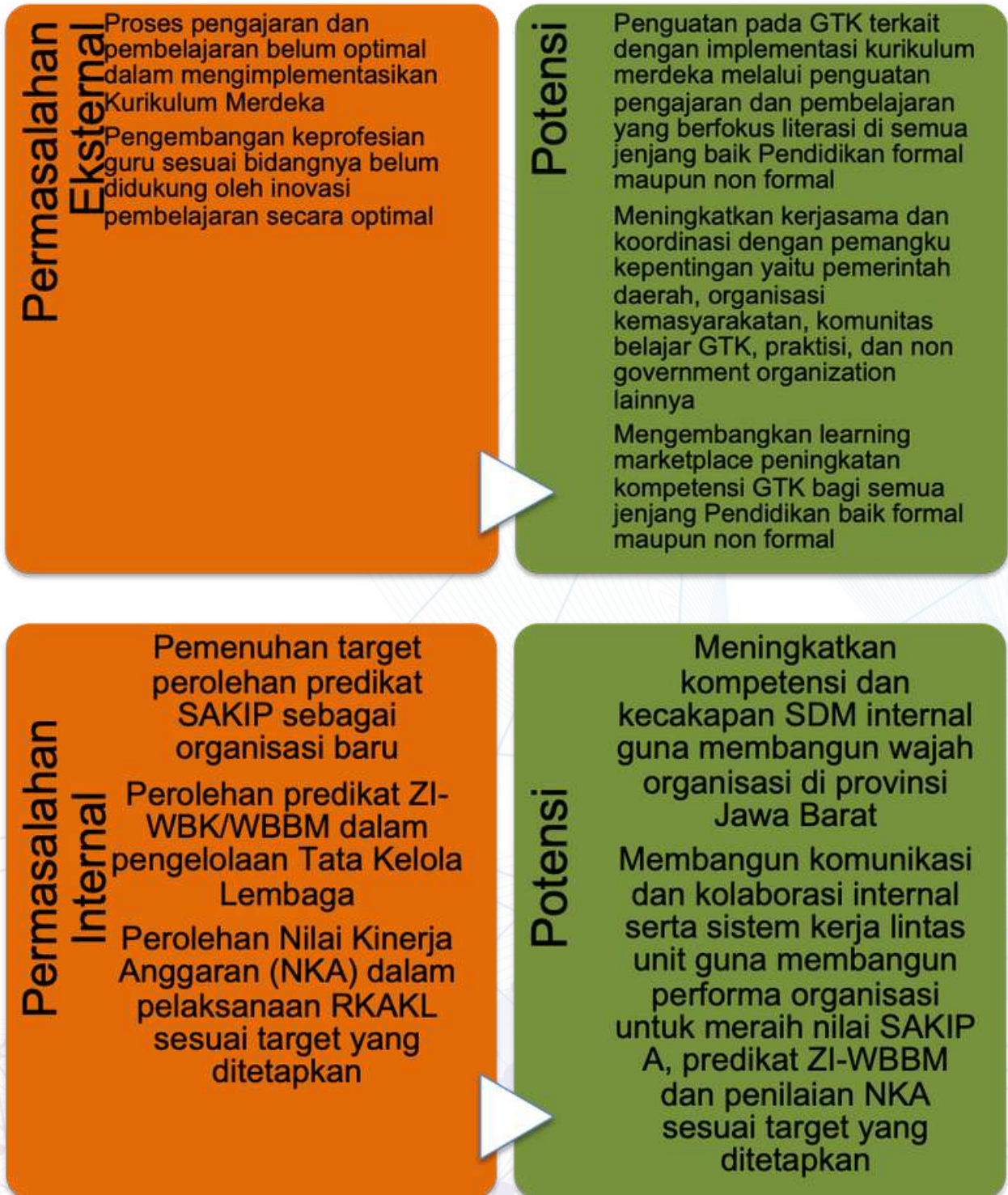


Gambar 1.14  
Lokakarya 2 PGP Angkatan 7 Kota Cimahi, 2023

1. Program DiDamba (Diklat Daring Masif dan Terbuka), Diklat dengan moda daring synchronous dan a-synchronous,
2. Program Diklat GTK Sains, Diklat dengan moda Luring / Tatap Muka bidang Sains,
3. Program Modis Pisan (Mobil Pendidikan Semua Pintar Sains), layanan demonstrasi berupa percobaan sains dengan menggunakan alat peraga IPA inovatif dalam mobil keliling,
4. Program Diklat GTK bidang TK, PLB dan Inklusi dengan moda Luring / Tatap Muka
5. Program Diklat Daring, Blended dan Mix Media bagi GTK bidang TK, PLB dan Inklusi melalui program E-Training dan Media Sosial
6. Program Diklat Otomatisasi dengan media Pahlawan
7. Program Media Sosial TKPLB, tayangan edukasi dan pembelajaran bagi GTK seperti D'GuN, LADO, Ngopi, Smile, Bicara TKPLB, PLC (Profesional Learning Community) dan Guru Merdeka Berbagai
8. Program Bioling atau Bioskop Keliling, pemutaran film keliling dengan media mobil
9. Program AdHM, Sekolah Ramah Anak dan Guru Sahabat Keluarga, merupakan program peningkatan GTK dan Stakeholder terkait dengan moda pendampingan dan coaching
10. Program Ruang Bersama, program diskusi dan pengembangan komunitas belajar bidang TK, PLB dan Inklusi,
11. Program Seminar, Webinar dan Bincang Edukasi dalam kesempatan Daring maupun Luring, menjadi aktifitas rutin.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengembangan program, tentu ditujukan pada semua sasaran yang berada di provinsi Jawa Barat yakni GTK baik formal maupun non-formal. Oleh karenanya, dalam mendukung program Merdeka Belajar, optimalisasi potensi akan menjadi modal bagi BBGP Prov. Jabar dalam menyusun strategi program dan anggaran yang mampu melayani semua sasaran GTK di provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan analisis permasalahan SWOT pada 1.1.3 diatas, BBGP Prov. Jabar melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal organisasi yang masing-masing memiliki potensi dalam pencapaian target kinerja organisasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut,.



# BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LEMBAGA

Mengacu pada permasalahan yang dikemukakan pada BAB 1, Renstra Kemendikbudristek dan Renstra Ditjen GTK, maka BBBGP Provinsi Jabar merumuskan visi dan misi lembaga untuk periode 2022 – 2024 sejalan dengan visi dan misi Kemdikbudristek, yakni

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BBGP Provinsi Jabar berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Kemdikbudristek dengan melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.



**Gambar 2.1**  
Lokakarya Orientasi PGP Angkatan 7  
Kota Bogor 2022



**Gambar 2.2**  
Yoga and meditation could be beneficial to building mental toughness.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BBGP Provinsi Jabar berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Kemdikbudristek dengan melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

**Gambar 2.3**  
Temu Sapa Komunitas Belajar  
kota Bogor, 2022

## 2.1. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis

Mengacu pada Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024, Tujuan Strategis Kemdikbudristek yang diampu oleh Ditjen GTK adalah TS ke 2 (dua) yakni “Penguatan mutu relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik” dan TS ke 5 (lima) yakni “Penguatan system tata kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel”. Sementara Sasaran Strategisnya mendukung TS 2 (dua) dan TS 5 (lima) yaitu Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang dan Sasaran Strategis 5 yaitu Menguatnya tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan kementerian 2020 – 2024, BBGP Provinsi Jabar menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai unit Eselon I ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Tujuan Strategis yang ditetapkan, sepenuhnya mengacu pada Sasaran Program Ditjen GTK yang sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja BBGP Provinsi Jawa Barat di tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 2.4  
Program Guru Calakan - Seri Webinar

Tabel 2.1  
Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis BBGP Jabar 2024

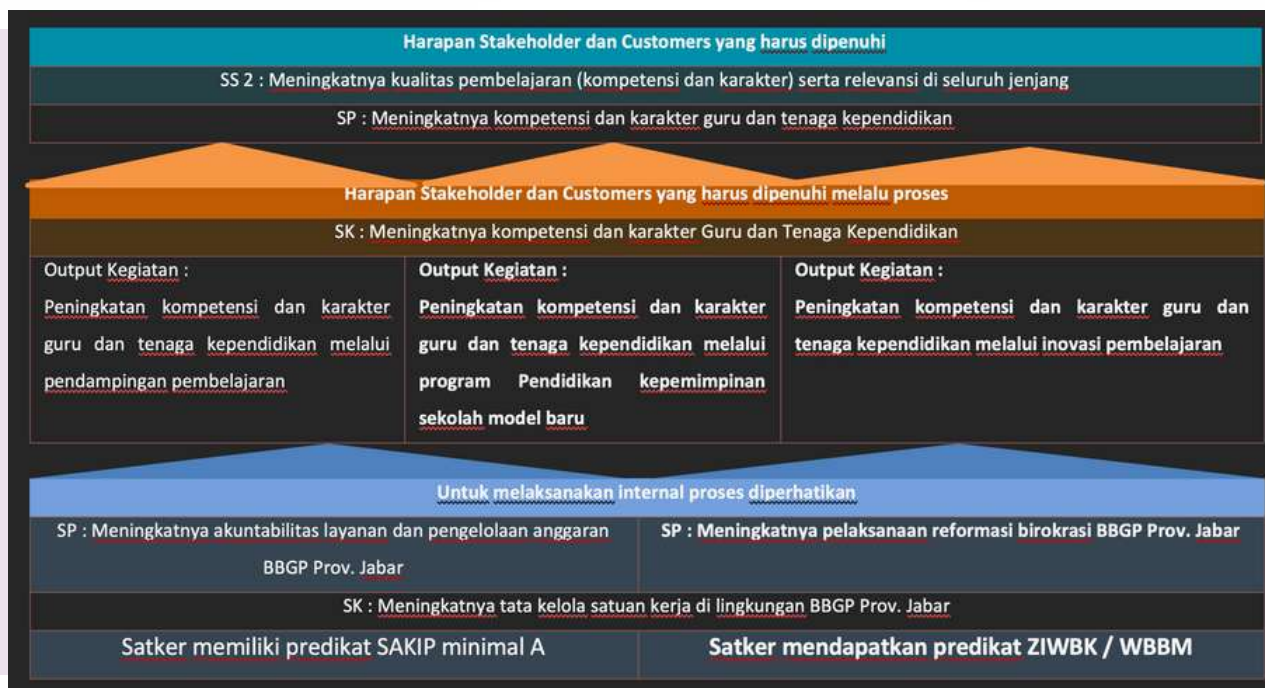
Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Target Tahun 2024 (%)/angka
TS 2: Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	ITS 2: Presentase meningkatnya kompetensi dan karakter guru dan tenaga kependidikan	49,83%
TS 5: Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	ITS 5.1: Predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar	A
	ITS 5.2: Indeks Reformasi Birokrasi BBGP Prov. Jabar	87

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Agar tujuan strategis yang ditetapkan di Tahun 2024 dapat tercapai, maka dirumuskan sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada akhir Renstra. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaiannya.

Berikut rincian dua sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan BBGP Prov. Jabar yang telah diturunkan dari satu tujuan strategisnya.

Tabel 2.2  
Peta Strategis BBGP Jabar 2022 – 2024



Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Peta strategi BBGP Prov. Jabar merupakan gambaran pemetaan atas strategi yang direpresentasikan ke dalam sasaran strategis organisasi yang membentuk hubungan sebab akibat dari berbagai sasaran strategis, yang digambarkan dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Perspektif stakeholder merepresentasikan visi BBGP Prov. Jabar kedepan. Perspektif customer merupakan ekspektasi pelanggan terhadap BBGP Prov. Jabar yang merupakan output dari Kemendikbudristek. Perspektif internal process merupakan sasaran strategis yang disusun berdasarkan proses bisnis BBGP Prov. Jabar. Sedangkan perspektif learning and growth merupakan sasaran strategis yang disusun berdasarkan tiga aset strategis yang dimiliki BBGP Prov. Jabar dalam menjalankan proses internal, yaitu modal manusia (human capital), modal informasi (information capital) serta modal organisasi (organization capital).

## 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan sasaran program, BBGP Prov. Jabar menetapkan indikator kinerja program yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program tahun 2022—2024 baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Tabel 2.3  
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BBGP Jabar Tahun 2022—2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program 2022-2024
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SP 2: Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Presentase meningkatnya kompetensi dan karakter guru dan tenaga kependidikan
	SP 5.1: Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<u>Predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar</u>
	SP 5.2: <u>Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi BBGP Prov. Jabar</u>	<u>Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi BBGP Prov. Jabar</u>

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Sasaran program merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dari program (Outcome) dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsi Output Program. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dirumuskan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BBGP Jabar sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BBGP Jabar Tahun 2022—2024

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
SP 2: Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SK 1 : Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 5.1: Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SK. 2 : <u>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan</u>
SP 5.2: <u>Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi BBGP Prov. Jabar</u>	

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 2.5  
Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BBGP Jabar Tahun 2022—2024

Indikator Kinerja Program 2022-2024	Indikator Kinerja Kegiatan 2022 - 2024
Presentase meningkatnya kompetensi dan karakter guru dan tenaga kependidikan	IKK 1.1 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam Peningkatan Inovasinya
	Jumlah Guru Yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru
Predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar	<u>Predikat SAKIP BBGP Jawa Barat</u>
Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi BBGP Prov. Jabar	Nilai Kinerja <u>Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat Rata-rata 99</u>

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

# BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Fokus utama RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 yaitu “Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat”. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yang menjadi prioritas nasional yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kurun waktu 2020 – 2024 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui program peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas dengan adanya Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan Pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BBGP Prov. Jabar akan mendukung 5 Tujuan dan sasaran strategis Kemdikbudristek sebagaimana berikut ini,

Tabel 3.1  
Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis

No	Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sumber: *SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022*

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan sebagai berikut,

1. Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Agenda Pembangunan 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3. Agenda Pembangunan 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan dukungan Kemdikbudristek pada 3 (tiga) agenda pembangunan di atas, maka disusun arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian. Adapun arah dan strategi Kemdikbudristek dalam kaitannya dengan peningkatan GTK secara nasional adalah Agenda Pembangunan 3 dan Agenda Pembangunan 7 dengan penjelasan sebagai berikut,



Gambar 3.1  
Bp Mohamad Hartono, SH., M. Ed,  
Kepala BBGP Prov. Jabar

Agenda Pembangunan (PN 3) “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Pembangunan Indonesia tahun 2020—2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Arah kebijakan atau Program Prioritas (PP) yang mendukung PN 3 yaitu PP — Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi atau Kegiatan Prioritas (KP):

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;

Tabel 3.2

Peran Kemdikbudristek dalam agenda pembangunan 3

Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	
PP	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	
KP 1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
KP 2	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

1. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;

2. Pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), platform daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan; ;
3. Pengembangan model peningkatan kompetensi dan pengembangan media pembelajaran bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi peningkatan kompetensi bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. Penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak, penguatan pembelajaran paradigma bagi melalui program sekolah penggerak dan pengembangan inovasi pembelajaran bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah melalui implementasi kurikulum merdeka;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah seperti adanya penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;

Agenda Pembangunan (PN 7) “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik”. Arah kebijakan yang mendukung PN 7 yaitu PP — Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi atau KP sebagai berikut,

1. Penguatan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional,
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi,
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran,
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.



Tabel 3.3

Peran Kemdikbudristek dalam agenda pembangunan 3

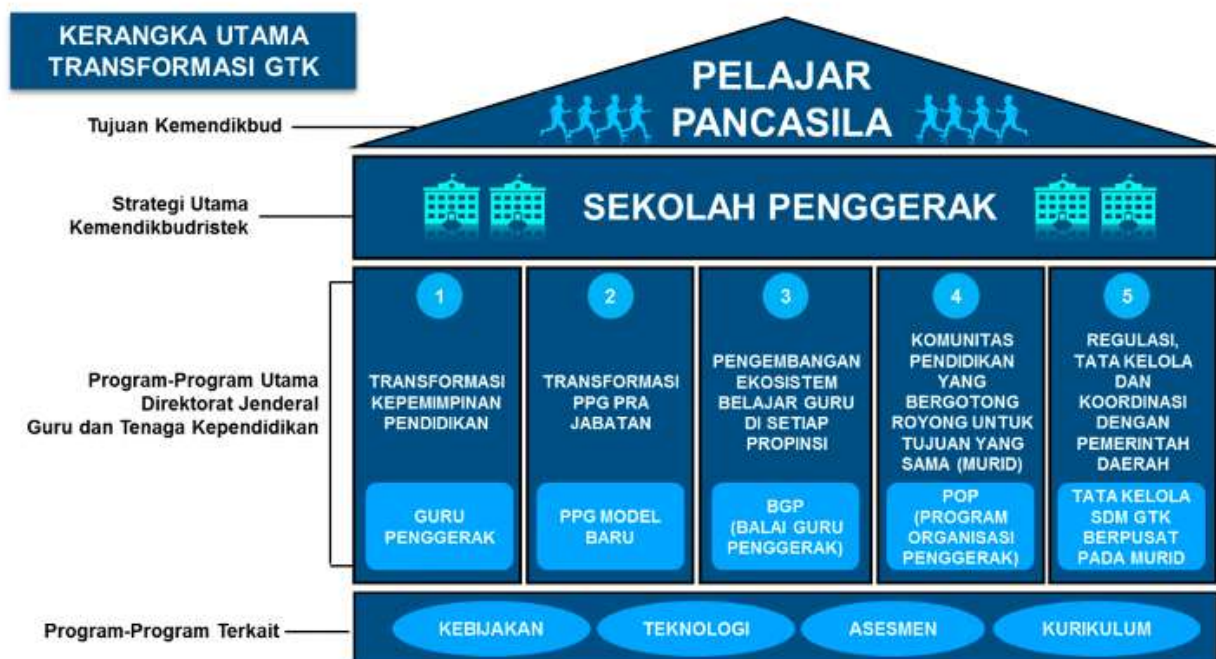
Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	
PP	Reformasi birokrasi dan tata kelola	
KP 1	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru.
2. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program.
3. Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan. Hal paling fundamental dari Kebijakan Merdeka Belajar adalah fokus terhadap kualitas belajar murid. Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan memberdayakan segenap pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan hasil belajar murid. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kurun waktu 2020 – 2024 dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan Pelajar Pancasila, yaitu transformasi Guru dan Tenaga kependidikan.



Gambar 3.2 Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumber: Renstra Ditjen GTK Tahun 2022 - 2024

Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

## 1. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan

Strategi:

Program Pendidikan Guru Penggerak.

Hasil yang diharapkan adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

## 2. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Strategi:

- Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
- Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Pra Jabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.

- Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus (case reasoning) tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring (online).
- Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan Guru generasi baru.

Hasil yang diharapkan adalah:

1. Pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru pemula yang profesional.
  2. Menghasilkan guru pemula yang profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan jaman.
  3. mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- ### 3. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi

Strategi:

Pembentukan Balai Guru Penggerak (BGP).

Hasil yang diharapkan adalah:

- Unit pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di setiap provinsi.
- Analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerahnya (provinsi) masing-masing

- Perencanaan program dan pengembangan inovasi model-model pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terdiferensiasi berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya.
- Fasilitasi dan pelaksanaan pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya
- Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan secara inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk perencanaan, pengembangan dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Analisis dampak program dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar murid di daerah (provinsi) masing-masing.

#### 4. Komunitas Pendidikan yang Bergotong Royong untuk Tujuan yang Sama (Murid)

Strategi:

1. Program Organisasi Penggerak (POP).
2. Diseminasi model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

Hasil yang diharapkan dari Program Guru Penggerak adalah:

- Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- Peningkatan proses dan kualitas belajar murid pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- Terdiseminasikan praktik-praktik baik hasil POP kepada sekolah-sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di berbagai daerah di Indonesia.

#### 5. Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Strategi: Omnibus Law

Hasil yang diharapkan adalah :

- Regulasi-regulasi di bidang guru dan tenaga kependidikan yang mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif serta dibidang pendidikan profesi guru, yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam peningkatan komprehensif.
- Naskah akademik.
- Transformasi guru dan tenaga kependidikan bertujuan mendorong proses transformasi sekolah agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Tujuan di atas sejalan dengan upaya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang.



**Gambar 3.3**  
Jum'at Bergerak  
BBGP Prov. Jabar



Gambar 3.4 Hubungan Program Strategis Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumber: Renstra Ditjen GTK Tahun 2022 - 2024

Arah kebijakan dan strategi yang tepat diperlukan untuk mencapai target kinerja, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Kebijakan yang diambil BBGP Prov. Jabar selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kemendikbud ristik dan Ditjen GTK dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah kerja dan tanggungjawab Lembaga.

Strategi merupakan cara yang dilakukan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Strategi berisikan kegiatan indikatif yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target. Berikut kebijakan dan strategi yang diambil BBGP Prov. Jabar untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama periode 2022 – 2024.

#### Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pembelajaran paradigma baru yaitu Program Sekolah Penggerak
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui program Pendidikan kepemimpinan sekolah model baru yaitu Program Pendidikan Guru Penggerak
3. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan inovasi pembelajaran berbasis teknologi yaitu Program Implementasi Kurikulum Merdeka
4. Peningkatan tata kelola lembaga melalui perolehan nilai predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar
5. Peningkatan tata kelola lembaga melalui perolehan predikat ZI-WBK/WBBM

#### Strategi Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan pembelajaran paradigma baru Program Sekolah Penggerak
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui program Pendidikan kepemimpinan sekolah model baru (Program Pendidikan Guru Penggerak)
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan inovasi pembelajaran berbasis teknologi (Program Implementasi Kurikulum Merdeka)
4. Melaksanakan peningkatan tata kelola lembaga melalui perolehan nilai predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar
5. Melaksanakan peningkatan tata kelola lembaga melalui perolehan predikat ZI-WBK/WBBM

### 3.2 Kerangka Regulasi

Regulasi yang menjadi dasar hukum keberadaan BBGP Prov.Jabar dalam melaksanakan kebijakan dan strategi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah Permendikbud No.14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan dan Balai Guru Penggerak. Namun ke depan fungsi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan perlu terus diperkuat. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, dibutuhkan penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku dan harmonisasi antara beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbudristek. Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2022—2024 di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan dan Target Penyelesaian Kerangka Regulasi BBGP Jabar

Arah Kebijakan dan/atau Kebutuhan Kebijakan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian	Target Penyelesaian
Penyusunan Proses Bisnis BBGP Prov. Jawa Barat	Dengan adanya peleburan 3 (tiga) lembaga menjadi 1 (satu) lembaga, maka sangat diperlukan tata kelola lembaga dengan pengaturan baru yang mengakomodir beberapa hal dibawah ini,	
	Penyusunan proses bisnis BBGP Prov.Jabar	Tahun 2023
	Penyusunan POS Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BBGP Prov.Jabar	Tahun 2023
	Petuniuk Teknis pelaksanaan Program Nasional dan Program Lembaga di BBGP Prov.Jabar	Tahun 2023 dan 2024

Sumber: BBGP Prov. Jabar 2022

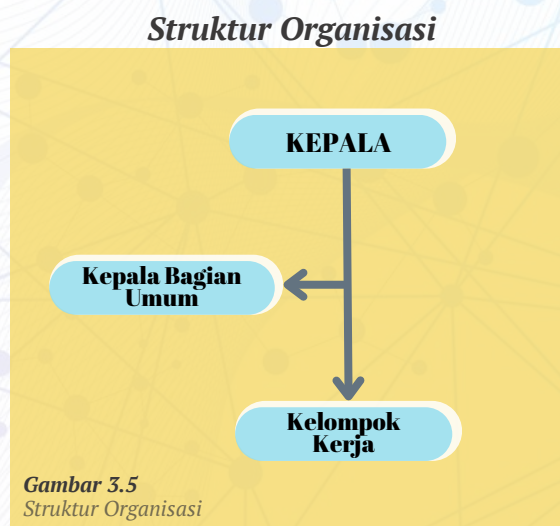
Kerangka Regulasi lain yang terkait dengan pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: PER/18/M.Pam/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2004
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan dan Balai Guru Penggerak
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak
- Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1917/B.B1/HK.01.01/2021 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak
- Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2368/B.B1/HK.01.03/2021 Tentang Penguatan SDM Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

BBGP Prov. Jawa Barat adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. BBGP dipimpin oleh satu orang kepala dibantu Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana gambar di berikut ini,



Sumber: Permendikbud No. 14 Tahun 2022

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut ini,

### **Tugas BBGP**

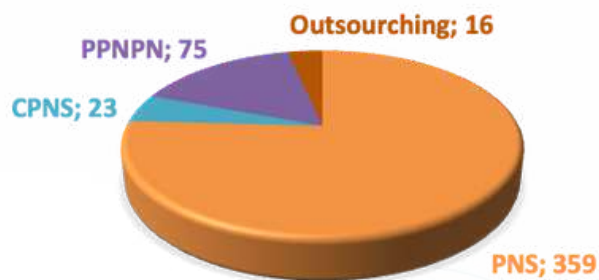
**melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.**

### **Fungsi BBGP**

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
3. pengembangan media pembelajaran guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
5. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
8. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan dukungan SDM aparatur yang memadai. Pegawai BBGP Prov. Jawa Barat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah memiliki Nomor Induk Kepegawain (NIP) yang memiliki instansi induk di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan termasuk Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBGP Prov. Jawa Barat didukung oleh 355 pegawai terdiri dari PNS sebanyak 359 orang, CPNS 23 orang, Outsourcing 16 orang dan 75 orang PPNPN.

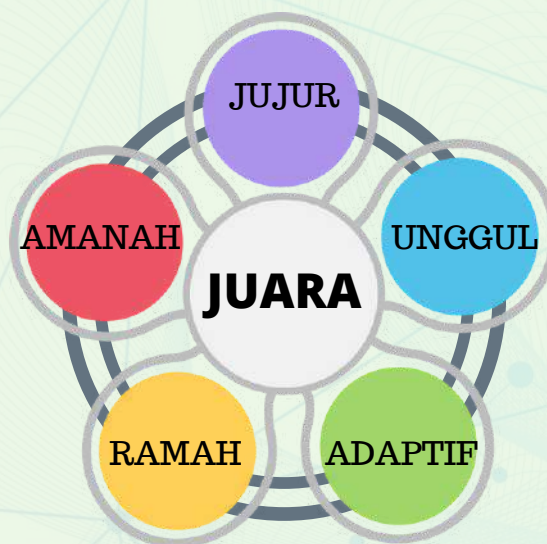
Tabel 3.5  
SDM sesuai dengan statusnya di BBGP Jabar



Sumber: Kepegawaian BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Sementara itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, pegawai mengusung Moto dan Tata Nilai “BBGP JUARA” karena BBGP Jabar bergerak Bersama untuk Jabar Juara. Adapun kepanjangan JUARA dimaksud adalah,

# BBGP



Gambar 3.6  
Moto dan Tata Nilai

Sumber: BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

## 3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sedang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk di Kemendikbudristek. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Melalui upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, reformasi birokrasi ditujukan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan road map reformasi birokrasi tahun 2020—2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi tahun 2020—2024.



**Gambar 3.7**  
Tujuan Reformasi Birokrasi  
KemenPAN RB 2020 - 2024

Sumber: Kemen PAN RB 2020 - 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi BBGP Jabar, maka terdapat tujuh area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di BBGP Jabar, yaitu

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yakni layanan guru dan tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan tugas dan fungsi BBGP Jabar, yaitu

- Menyediakan akses data pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Menyediakan model – model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Menyediakan media pembelajaran guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Membuka layanan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Memberikan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- a. Melakukan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- c. Menerima kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
- Menerima audiensi.

# BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek Tahun 2020—2024, BBGP Jabar telah menetapkan tujuan atau sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya, dimana target kinerja digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi, mulai tahun 2022 s.d 2024 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1  
Sasaran kegiatan dan target perjanjian kinerja BBGP Jabar

Kode	Sasaran program / Sasaran Kegiatan / Indikator (IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024		
SP	Meningkatkan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional							
SK	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan							
IKK 2.4.2.2	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru	Orang	-	6.495	8.660	17.320	BBGP Provinsi Jawa Barat SEAMEO QITEP in Science SEAMEO QITEP in Language	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
IKK 2.3.2.3	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensinya	Orang	-	40.714	40.714	40.714	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
IKK 2.4.2.3	Jumlah Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	-	2.172	3.382	3.382	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
SP	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi							
SK	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan BBGP Jabar							
IKK 5.3.5.1	Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	BBGP Provinsi Jawa Barat SEAMEO QITEP in Science SEAMEO QITEP in Language	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

Tabel 4.2  
Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis BBGP Jabar 2022 – 2024

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Target Tahun 2022 (%) / angka	Target Tahun 2023 (%) / angka	Target Tahun 2024 (%) / angka
TS 2: Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	ITS 2: Presentase meningkatnya kompetensi dan karakter guru dan tenaga kependidikan	40%	45%	49,83%
TS 5: Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	ITS 5.1: Predikat SAKIP BBGP Prov. Jabar	A	a	A
	ITS 5.2: Indeks Reformasi Birokrasi BBGP Prov. Jabar	82	85	87

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun sebagai perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target-target yang ditetapkan. berikut proyeksi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pencapaian target yang ditetapkan selama periode Renstra 2022 - 2024.

Tabel 4.3  
Kerangka Pendaan BBGP Jabar 2022 – 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (ribuan)		
			Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikannya	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	54,039,346	188,534,798	188,534,789
		2. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	2,079,237	3,005,171	3,005,171
		1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	44,821,042	58,651,933	58,651,933
2	Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat	2.1 Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	14,413,628	50,424,869	50,424,869
		2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat			

Sumber: SAKIP BBGP Prov. Jabar Tahun 2022

# BAB 5 SEAQIS DAN SEAQIL



Southeast Asian  
Ministers of Education  
Organization



SEAMEO  
Regional Centre for  
QITEP  
IN SCIENCE



SEAMEO QITEP  
LANGUAGE



SEAMEO adalah singkatan dari South Asean Minister Education Organization. Organisasi yang dibentuk oleh seluruh Menteri Pendidikan yang ada dinegara-negara ASEAN. SEAMEO berdiri pada tahun 1965 dengan tujuan untuk membangun kerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada wilayah tersebut. Berbagai aspek menjadi topik perhatian SEAMEO, salah satunya adalah peningkatan mutu kompetensi guru dan tenaga kependidikan atau QITEP (Quality Improvement for Teachers and Education Personnel).

Di Indonesia terdapat 3 organisasi yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2009, dengan fokus meningkatkan mutu guru di 3 bidang yaitu yaitu

1. SEAMEO QITEP in Science atau SEAQIS.
2. SEAMEO QITEP in Language atau SEAQIL
3. SEAMEO QITEP in Mathematics.

Dasar pemilihan 3 bidang dimaksud, ditujukan untuk meningkatkan peringkat PISA negara-negara di Asia Tenggara. Saat ini anggota SEAMEO ada 11 (sebelas) negara yaitu : (1) Brunei Darussalam, (2) Kamboja, (3) Indonesia, (4) Laos, (5) Malaysia, (6) Myanmar, (7) Filipina, (8) Singapura, (9) Thailand, (10) Timor Leste, dan (11) Vietnam.

Sejalan dengan berdirinya BBGP, ketiga organisasi secara anggaran, bergabung di 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu BBGP Jabar dan BBGP DIY. SEAQIS dan SEAQIL bergabung pada BBGP Jabar,

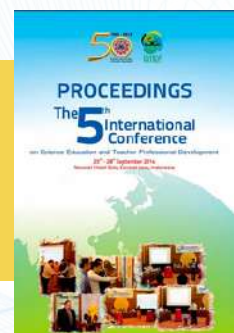


## 5.1 SEAMEO QITEP in Science

SEAQIS memiliki **visi** untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan IPA untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Guru diharapkan dapat berinovasi dan kreatif dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran sains. Inovasi pembelajaran salah satunya dengan menggunakan video hands-on activity.

Sebagai wadah dan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pembuatan video pembelajaran sains, juga dalam rangka perayaan ulang tahun SEAQIS ke-12, SEAQIS menyelenggarakan Hands-on Activity Video Contest. Kontes ini terbuka bagi guru dan siswa semua jenjang pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi peserta untuk mewujudkan ide dan kreativitasnya untuk menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan.

**SEAMEO QITEP In Science (SEAQIS)** merupakan Unit kerja yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan IPA di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan strategis SEAMEO Tahun 2011 - 2020 untuk mengembangkan pusat regional yang unggul dan menyediakan program yang relevan dan responsif dalam membahas masalah nasional dan regional di bidang spesialisasi SEAMEO.



**Misi SEAQIS** adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan program yang relevan dan berkualitas dalam pengembangan profesional bagi guru sains dan tenaga kependidikan di Asia Tenggara.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan sains, manajemen sekolah, kebijakan publik, dan bidang terkait lainnya.
3. Memperluas dan memperkuat jaringan melalui berbagi sumber daya dan informasi untuk mendukung visibilitas dan kepemimpinan Centre.
4. Menyediakan data dan informasi pendidikan sains terkini, unggul, dan relevan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya Pusat untuk memberikan pelayanan prima.

# STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Website <https://www.qitepinscience.org>



Pada tahun 2021 - 2022, SEAQIS tetap hadir dengan berbagai program dan inovasi untuk mencapai target sasaran di wilayah Asia Tenggara. Capaian kinerja lembaga dimaksud adalah sebagai berikut :

1 Regular Training Activities		2 Customised Training Activities		4 Workshops, Seminars, and Webinars	
Activities	Achievement	Activities	Achievement	Activities	Achievement
EESD	Attended by 42 teachers: 38 Indonesian and 4 Philippines	Training on the Improvement of Primary Teachers in Mataram City	39 elementary school science teachers	Online Workshops on Creation of Science Learning Video	85 participants
ESS	Attended by 20 teachers: 17 Indonesian and 3 Philippines	Training on Integration of Computational Thinking in Science Learning	90 junior high school science teachers	Workshop on Southeast Asia Climate Change Education Programme (SEA-CEP) Development - Phase 1	30 participants
SCS	Attended by 13 school principals and supervisors from Indonesia	In-Service 2 training on Integration of Computational Thinking in Science Learning	39 Senior High School Physics teachers	Workshop on SEA CEP Development - Phase 2	36 participants
		In-House Training 4 on the Implementation of STEM Learning in Partner School	40 Senior High School Chemistry teachers	Workshop on Augmented Reality for Science Education	41 participants
		Training on Science Learning Supervision for Junior High School Principals	70 Senior High School Biology teachers	Workshop on 21st Century Learning in Timor Leste	34 teachers
		Online training on Research Proposal in Science Learning	20 Biology teachers	Workshop on Finalisation of the SEA-CEP Academic Paper Development	21 participants
		Training on the Use of Augmented Reality (AR) in Science Learning	20 Physics teachers	Workshop on STEM Learning Implementation Results	75 teachers
		Training Course on Research Skills and Report Writing for SEAQIS Research Grantees 2021	20 Chemistry teachers	Workshop on the preparation of SEA-CEP	21 participants
				Webinar Series online	11 webinar series

Sumber: Annual Report SEAQIS 2021 - 2022

Program lain yang juga dikembangkan oleh SEAQIS dalam konteks lintas negara, terakomodir dalam program Collaboration Training

### Collaboration Training

01	In-House Training 4 Implementation of STEM Learning in Partner Schools (YBRI)	62 teachers
02	Training on Supervision Competency Improvement for Primary School Principals and Supervisors in North Lombok Regency Batch 3	35 participants
03	Workshop on 21st Century Skills through Technology in Science and Mathematics for Timor Leste Science Teachers	34 participants
04	Training on Strengthening Core Teacher Competencies for Science Elementary Schools in Batuk, Banjarmasin Regency	15 teachers
05	Training on Strengthening Core Teacher Competencies for KKG Science Elementary Schools in Keajar, Regency	22 teachers
06	Training on Implementasi Kurikulum Merdeka for Junior High School Teachers	222 teachers
07	Training on Implementasi Kurikulum Merdeka for Junior High School Principals and Supervisors	263 teachers
08	Training on Implementasi Kurikulum Merdeka for Elementary Teachers in Bogor, Regency	276 teachers



## 5.2 SEAMEO QITEP in Language

Dalam memberikan program yang berkualitas, SEAQIL selalu berinovasi guna memenuhi kebutuhan para guru bahasa dan juga tenaga kependidikan untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Lebih lanjut, SEAQIL berupaya untuk memelihara dan memperkuat hubungan dengan Centres lain, sekolah, narasumber, dan lembaga atau orang-orang terkait dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, SEAQIL terus berkolaborasi dalam peningkatan pendidikan di kawasan Asia Tenggara.

### **Visi SEAQIL** adalah

Pusat yang unggul secara profesional di bidang inovasi pengembangan pendidikan bahasa dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara

### **Misi SEAQIL** adalah

Menyediakan program pengembangan profesionalisme yang berkualitas bagi guru bahasa melalui pengembangan sumber belajar, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kapasitas dan jejaring.

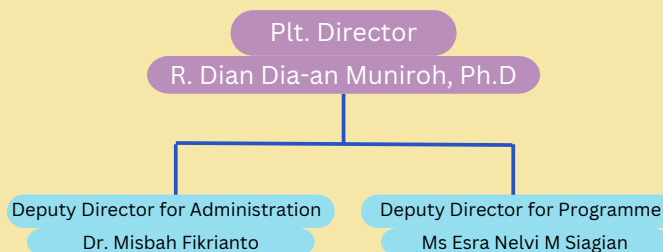
### Goals yang ingin diraih adalah

1. Meningkatkan kualitas guru bahasa melalui pengembangan sumber belajar, peningkatan kapasitas, serta penelitian dan pengembangan
2. Memelihara dan memperkuat hubungan kerja sama di antara negara anggota SEAMEO dengan fokus pada inovasi pengembangan pendidikan bahasa

SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language (SEAQIL) merupakan sebuah pusat regional yang didirikan oleh Southeast Asia Ministers of Education (SEAMEO) yang berfokus pada pengembangan kualitas guru bahasa (Bahasa Indonesia sebagai Penutur Asing (BIPA), Arab, Jepang, Jerman, dan Mandarin) serta tenaga kependidikan.



# STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Annual Report SEAQIL 2021 - 2022

Pada tahun 2021 - 2022, SEAQIL tetap hadir dengan berbagai program dan inovasi untuk mencapai target sasaran di wilayah Asia Tenggara. Capaian kinerja lembaga dimaksud adalah sebagai berikut :



Sumber: Annual Report SEAQIL 2021 - 2022





## 5.3 Target dan Sasaran 2023

Pada tahun 2023, target dan pembiayaan SEAQIS dan SEAQIS menjadi satu dalam satu kesatuan IKK 2.4.2.2 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru dengan target 333 orang dan merupakan pendukung program Sekolah Penggerak. RO DCI Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa, Matematika, dan IPA di Kawasan Asia Tenggara, yang menjadi IKK bagi SEAMEO QITEP, belum dapat dimunculkan dalam mata anggaran terpisah, oleh karenanya masih menggunakan IKK Ditjen GTK.

Berikut adalah target kinerja dan kerangka pendanaan dari SEAQIL dan SEAQIS :

Kode	Sasaran program / Sasaran Kegiatan / Indikator (IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam jutaan rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SP	Meningkatkan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional										
SK	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan										
IKK 2.4.2.2	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru	Orang	-	-	333	1.500	-	2.438	12.359	SEAMEO QITEP in Science SEAMEO QITEP in Language	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Annual Report

# BAB 6 PENUTUP

Renstra BBGP Jabar Tahun 2022—2024 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020—2024. Renstra ini disusun menjadi 2 bagian yaitu pada tahun 2020 - 2022 yang menjadi Renstra P4TK yang sudah di likuidasi dan Renstra 2022 - 2024 sebagai Renstra BBGP Jabar. Diharapkan Renstra ini digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta digunakan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit organisasi.



Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan Renstra dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, maka penyelarasan Renstra BBGP Jabar dengan revisi Renstra Ditjen GTK Tahun 2020—2024 terkait dengan sasaran, indikator dan targetnya. Renstra BBGP Jabar akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan terus disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan peraturan perundang undangan. Dengan demikian diharapkan BBGP Jabar akan memiliki dokumen perencanaan strategis yang terbaru dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakannya.

Kepala  
BBGP Provinsi Jawa Barat



Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.  
NIP 196701101994031003

**SALINAN  
LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU  
PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 0666/B7.2/OT.01.00/2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR  
GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022-2024**

## **Deskripsi Operasional**

### **IKK 1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru**

#### **Deskripsi :**

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru.

Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, sehingga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan salah satu bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak (PSP).

PSP adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah ..

..., Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi PSP. Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.

Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang dapat mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan yang bernaung pada sekolah penggerak mendapatkan pelatihan dari pelatih ahli, baik dalam tatap muka maupun online, coaching, inhouse training, dan juga lokakarya.

## Sumber Data :

Laporan Kegiatan Tim Kerja Transformasi Sekolah

## Cara Menghitung :

Dihitung berdasarkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru.

Rumus :

$$\sum \text{GTK Mengikuti PPB} = A$$

## Keterangan :

A = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru

## Satuan :

Orang

## Tipe Perhitungan :

Non Kumulatif

## Tahun perhitungan :

Tahunan

## Unit yang bertanggungjawab :

- Tim Kerja Transformasi Sekolah
- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka
- Tim Kerja Inovasi Pembelajaran
- SEAMEO QITEP in Science
- SEAMEO QITEP in Language

## Penanggungjawab Data :

- Tim Kerja Transformasi Sekolah
- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka
- Tim Kerja Inovasi Pembelajaran
- SEAMEO QITEP in Science
- SEAMEO QITEP in Language

## IKK 1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya

### Deskripsi :

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya.

Salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform teknologi yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya kapan pun dan di mana pun dalam mengembangkan kompetensinya. Mendorong pendidik saling belajar dalam ruang kolaborasi dan komunitas belajar (Learning Community) dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan (Social Constructivism).

Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan salah satu contoh platform teknologi yang dirancang untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi peserta didik untuk melakukan merdeka belajar, yang terdiri dari :

- 1.Seri asesmen kompetensi minimum;
- 2.Seri literasi dan numerasi;
- 3.Seri pendidikan keterampilan hidup;
- 4.Seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK;
- 5.Seri pendidikan inklusif; dan
- 6.Seri masa pandemic Covid-19; dan lain sebagainya.

Sasaran program Guru Belajar dan Berbagi adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki akun SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan)

**Sumber Data :**

Laporan Kegiatan Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka

**Cara Menghitung :**

Dihitung berdasarkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengakses PMM dari tahap pembelajaran sampai menyelesaikan topic PMM.

$$\sum \text{GTK Mengikuti PPB} = A$$

**Keterangan :**

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya

**Satuan :**

Orang

**Tipe Perhitungan :**

Non Kumulatif

**Tahun perhitungan :**

Tahunan

**Unit yang bertanggungjawab :**

- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka

**Penanggungjawab Data :**

- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka

### IKK 1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru

**Deskripsi :**

Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah banyaknya guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak.

Program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah program pendidikan guru penggerak, yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistic, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplentasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladandan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Dengan kata lain program pendidikan guru penggerak adalah program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.

Program guru penggerak bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.

**Sumber Data :**

Laporan Kegiatan Tim Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah.

**Cara Menghitung :**

Dihitung berdasarkan jumlah guru yang mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak.

$$\sum \text{GTK Mengikuti PPB} = A$$

**Keterangan :**

A = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP)

**Satuan :**

Orang

**Tipe Perhitungan :**

Non Kumulatif

**Tahun Perhitungan :**

Tahunan

### Unit yang bertanggungjawab :

- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka
- Tim Kerja Kemitraan
- Tim Kerja Akreditasi Profesional Guru
- Tim Kerja Transformasi Digital
- Tim Kerja Bagian Umum
- Tim Kerja Inovasi pembelajaran

### Penanggungjawab Data :

- Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka
- Tim Kerja Kemitraan
- Tim Kerja Akreditasi Profesional Guru
- Tim Kerja Transformasi Digital
- Tim Kerja Bagian Umum
- Tim Kerja Inovasi pembelajaran
- 

## IKK 2.1 Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat

### Deskripsi :

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

### Cara Menghitung :

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Rumus :

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (otcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

### Sumber Data :

Lembar Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan teknologi.

### Satuan :

Predikat

### Tipe Perhitungan :

Non Kumulatif

### Tahun Perhitungan :

Tahunan

### Unit yang bertanggungjawab :

- Bagian Umum BBGP Jabar

### Penanggungjawab Data :

- Bagian Umum BBGP Jabar

## IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat

### Deskripsi :

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

### Cara Menghitung :

Rumus :  $\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = \text{Nilai EKA (60\%)} + \text{Nilai IKPA (40\%)}$

### Satuan :

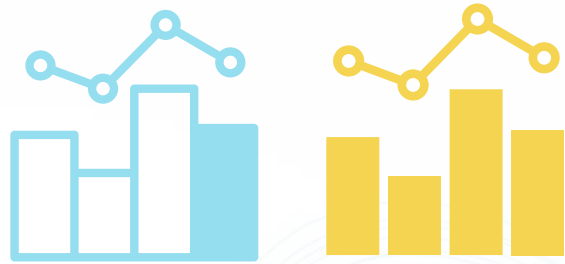
Skor / Angka Absolut

### Tipe Perhitungan :

Non Kumulatif

### Tahun Perhitungan :

Tahunan



Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Sumber Data :

Dashboard Simproka pada aplikasi SPASIKITA, OM-SPAN, dan SMART

### Unit yang bertanggungjawab :

- Bagian Umum BBGP Jabar

### Penanggungjawab Data :

- Bagian Umum BBGP Jabar

SALINAN  
LAMPIRAN 3  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU  
PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 0666/B7.2/OT.01.00/2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR  
GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022-2024

**Matrik Kinerja dan Pendanaan BBGP Jabar Tahun 2020 - 2024**

Kode	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SP	<u>Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional.</u>										
SK	<u>Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</u>										
IKK 2.4.2.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	-	6,495	8,660	17,320	54,039	188,534	188,534	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Internal
IKK 2.3.2.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	-	40,714	40,714	40,714	2,079	3,005	3,005	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Internal
IKK 2.4.2.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	-	2,712	3,382	3,382	44,821	58.651	58.651	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Internal
SP	<u>Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi</u>										
SK	<u>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan BBGP Jabar.</u>										
IKK 5.3.5.1	Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	Predikat	A	A	A	A	14,413	50,424	50,424	BBGP Provinsi Jawa Barat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Kepala  
BBGP Provinsi Jawa Barat



Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.  
NIP 196701101994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK  
PROVINSI JAWA BARAT  
2023**